

PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL -RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH) BAGI KELUARGA MISKIN DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011

Oleh :

Nadia Dewinta, H. Muhammad Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau : Nadiadewinta@yahoo.com, 085264561686

Abstract

This study aims to look at the implementation of the programs social rehabilitation – house no livable (RS – RTLH) in district east bintan of bintan regency. Which is the purpose of the program is that housing needs are met and proper sanitation to improve the social welfare of poor people. This study uses qualitative research analysis technique such as descriptive analysis techniques. From the result of this study , it is known that the process of implementation of this program is going pretty well because the results could have been felt by people directly in the implementation of its own though there are still shortcomings, weakness and barriers. But the implementation is expected to be better in the future both in terms of socialization, so that the delivery of programs to society can be more detail and in depth.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, Kemiskinan, Rumah Tidak Layak Huni

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acap kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi dan Sumarto, 2001). Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Hendriwan, 2003).

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan , sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh.

Menurut data dari Kecamatan Bintan Timur, jumlah penduduk Kecamatan Bintan Timur yakni 36.805 jiwa dan jumlah penduduk miskin yaitu 1.438 jiwa. Saat ini masalah rumah menjadi perhatian pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kehidupan mereka, tidak semua masyarakat mampu membuat rumah yang mereka idamkan, keterbatasan merekalah yang akhirnya hanya memiliki rumah ala kadarnya, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin yang selanjutnya disebut P2FM pemerintah melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Tahun 2011 di Kabupaten Bintan ditetapkan sebanyak 550 unit rumah yang akan direhab dan khusus Kecamatan Bintan Timur mendapat 36 unit rumah yang akan direhabilitasi dengan rincian :

1. Kelurahan Lengkuas : 32 unit
2. Kelurahan Kijang Kota : 3 unit
3. Kelurahan Sei Enam : 1 unit

Namun dalam prosesnya terdapat gejala – gejala penyimpangan dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bintan timur Kabupaten Bintan yang penulis amati, yaitu :

1. Ketidaktepatan sasaran pendataan, dalam hal ini masih dijumpai kecendrungan memasukkan kerabat atau orang – orang yang dekat dengan si pendata (pembuat daftar), hal ini dikarenakan pada saat pendataan baik pencacah maupun ketua RT tidak menegetahui secara pasti bahwa pendataan tersebut digunakan sebagai dasar pendataan sasaran program RS-RTLH.
2. Terbatasnya kegiatan sosialisai dimana tidak ada yang bersifat formal dan detail sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program ini terutama masyarakat yang berada dipelosok – pelosok yang minim informasi.
3. Bahwa dalam pengerjaan RS-RTLH, waktu yang ditetapkan selama 120 hari kurang mencukupi untuk memperbaiki rumah, karena faktor cuaca yang tidak bisa ramalkan seperti hujan dan juga penerima RS-RTLH yang memiliki pekerjaan sehingga tidak setiap hari mengerjakan rehabilitasi rumah.
4. Dalam pendistribusian bahan material sering terlambat karena bahan yang dipesan kehabisan stok, sehingga penerima RS-RTLH harus menunda merehab rumah.
5. Proses pencairan dana yang tidak efektif, karena apabila dalam satu kelompok ada satu rumah yang belum mencapai 70% maka sisa dana 30% tidak dapat diberikan sehingga harus menunggu.

Berdasarkan pengamatan penulis pada lokasi penelitian, dan sesuai dengan latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahan yang patut diteliti, yaitu : “Mengapa Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin di Kecamatan Bintan Timur Tahun 2011 berjalan tidak lancar?”. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kecamatan Bintan Timur Tahun 2011 tidak berjalan dengan baik.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci yaitu berusaha mencari fakta-fakta yang terjadi disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian yang dipaparkan secara jelas mengenai suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data yang mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat otentik lagi. Sebab data tersebut diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Serta data agregat yaitu data yang telah diolah oleh orang lain, misalnya hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan sebagainya.

Selain data sekunder tersebut diatas, digunakan pula data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan observasi. Cara ini ditempuh dengan alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisisioner. Selain itu dengan teknik ini juga diharapkan akan mendapatkan suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas namun tetap dalam konteks pembahasan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*Snowball sampling*). Pemilihan informan dengan teknik bola salju merupakan teknik yang tepat dalam penelitian kualitatif terutama dalam hal penelitian topik-topik yang sensitif atau populer yang sulit dijangkau. Strategi dasar teknik bola salju dimaksud dengan menetapkan satu atau beberapa orang informan kunci (*Key Informan*) dan melakukan interview dengan menetapkan satu atau beberapa orang diminta arahan, saran, petunjuk siapa sebaiknya yang menjadi informan berikutnya yang menuntut mereka memiliki pengetahuan, pengalaman informasi yang dicari, selanjutnya penentuan informan berikutnya.

Adapun wilayah pengamatan yang dipilih yaitu di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Pertimbangan pemilihan tempat penelitian berdasarkan pada pertimbangan praktis dalam hubungannya secara geografik dimana letaknya mudah dijangkau serta mudahnya memperoleh data.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Bulukumba. Hasil kajian dokumen dan hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni Bagi Keluarga Miskin Di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial - rumah tidak layak huni (RS-RTLH) bertujuan untuk melihat atau mengetahui sejauhmana program pemerintah itu dapat dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, tepat waktu pengerjaan, dan tepat sasaran sehingga tujuan diadakannya RS-RTLH benar-benar dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah yang layak untuk di huni.

Program RS-RTLH adalah Program yang diberikan kepada rumah tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standart untuk dihuni, dengan dimaksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupan secara wajar. Kegiatan Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan memanfaatkan dana dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Sehubungan dengan pelaksanaan RS-RTLH, seseorang akan mengalami kesulitan apabila program itu tidak terealisasi dengan baik, maka dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai tujuan ataupun mekanisme dari program yang dilakukan melalui sosialisasi, apapun bentuk program kalau tidak disosialisasikan akan sulit bagi masyarakat untuk mengerti. Untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan RS-RTLH maka dibutuhkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi pertanyaan tentang perbaikan rumah ini, maka petugas dapat membuktikan kenapa orang itu dapat RS-RTLH sedangkan yang lain tidak mendapatkan.

Bertitik tolak dari sosialisasi, langkah selanjutnya tentang keluaran kebijakan dalam hal ini implementasi RS-RTLH, kemudian memperlihatkan variabel-variabel dalam mekanisme pelaksanaannya yang merupakan langkah awal untuk mengimplementasikan RS-RTLH terutama di Kecamatan Bintang Timur. Namun kenyataannya masih dijumpai rumah penerima RS-RTLH yang belum siap ataupun masih setengah jadi disebabkan kekurangan dana sehingga, ini menjadi beban pikiran bagi penerima sedangkan, kemampuan mereka untuk merehab rumahnya sudah tidak cukup lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penerima RS-RTLH yang tidak mempunyai kemampuan lebih dalam hal ini memiliki uang lebih tidak dapat memperbaiki rumah mereka secara sempurna. Implementasi RS-RTLH di tentukan oleh empat aspek yaitu keluaran kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dampak nyata kebijakan, dan persepsi terhadap dampak.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial - Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan / penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak / hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil beberapa pemaparan diatas

dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian kegiatan Pelaksanaan program RS-RTLH di Kecamatan Bintang Timur sudah berjalan dengan baik, tetapi dalam Pelaksanaanya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada didalam proses pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang ini.

Adapun kendala yang ditemukan dalam implementasi program RS-RTLH ini adalah sebagai Berikut :

a. Kurangnya Dana yang Diberikan

Besarnya kisaran dana dalam suatu proses pembangunan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu juga dalam program rehabilitasi sosial – rumah tidak layak huni ini, dimana keberhasilan suatu proses rehabilitasi juga ditentukan oleh besar kisaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program RS-RTLH ini

Berkaitan dengan kurangnya dana yang diberikan untuk merehabilitasi rumah, sehingga penerima mengalami kesulitan untuk menyelesaikan rumah mereka. Mungkin tidak akan menjadi masalah bagi penerima yang memiliki sedikit tabungan untuk menambah kekurangan dari pembuatan rumah tetapi akan menjadi kendala apabila penerima tidak memiliki tabungan sehingga akan menjadi beban pemikiran bagi penerima karena harus mempersiapkan rumah sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah sulit.

b. Ketidaktepatan Waktu dalam Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program RS-RTLH telah ditetapkan batas waktu untuk merehab rumah, yaitu 120 hari kerja atau 4 bulan kalender. Berdasarkan wawancara dengan penerima, ada beberapa penerima mengatakan waktu pelaksanaan RS-RTLH tidak cukup. Hal tersebut terjadi oleh beberapa hal, seperti keterbatasan dana, keterlambatan datangnya bahan bangunan dan juga disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang bersahabat.

Program RS-RTLH memiliki dua jenis, pertama untuk membangun rumah dari awal artinya rumah penerima yang dulu akan dibongkar dan yang kedua untuk rumah yang hanya direhab saja atau diperbaiki mana yang sudah tidak layak digunakan, seperti atap rumah yang bocor, dinding rumah papan yang lapuk dan menambahkan apa saja yang kurang bagus. Menurut wawancara, waktu pelaksanaan RS-RTLH tidak cukup disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang mendukung, pengantaran barang yang lama dan ada penerima yang mengatakan mereka akan mengerjakan bila ada waktu saja, karena penerima RS-RTLH juga memiliki pekerjaan yang harus dijalani, jika tidak bekerja maka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan program RS-RTLH tidak mencukupi disebabkan oleh faktor cuaca dan keterlambatan pengantaran barang yang kehabisan stok. Faktor lainnya adalah keterbatasan waktu yang dimiliki penerima RS-RTLH karena harus

bekerja. Menurut pengamatan yang dilakukan pada lokasi penerima RS-RTLH, Pelaksanaan RS-RTLH akan tepat waktu, jika rumah tersebut hanya direhab saja memang tidak akan memakan waktu yang lama, karena hanya memperbaiki yang rusak seperti atap yang bocor atau kamar mandi yang diperbaiki dan bagian rumah lainnya yang perlu untuk direhab, tetapi jika rumah yang membangun dari awal akan memakan waktu lama, apalagi ukuran rumah penerima sudah tidak mengikuti standart dari pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang didasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program ini cukup baik karena hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang terjadi.
2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, diantaranya berupa kurangnya dana yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada sasaran RS-RTLH, dan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program RS-RTLH yang antara lain disebabkan oleh waktu yang diberikan, keterlambatan datangnya bahan bangunan serta oleh faktor cuaca yang tidak mendukung.

Saran

1. Diharapkan kepada tim pelaksana kegiatan dimulai dari tingkat pusat sampai masyarakat agar menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sehingga tahapan-tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program, pencairan dana bantuan serta upah harus tepat pada waktunya agar program terlaksana dengan baik dan program Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni ini benar-benar menyentuh masyarakat miskin serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan program Rehabilitasi Sosial RTLH, usulan kegiatan hendak lebih melihat apa yang memang dibutuhkan bukan melihat dari apa yang diusulkan pemerintah setempat saja, sehingga program tidak mengena kepada masyarakat miskin namun hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka dilakukan pemeliharaan sehingga hasil program bisa dimanfaatkan secara terus menerus oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto. 2006. "*Prosedur Penelitian*". Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, N. William. 2000. "*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*". Universitas Press : Yogyakarta.
- Fayol, Hendry. 1989. "*General Industry Manajemen*". Dikutipoleh Sarwoto, Dasar – Dasar Organisasi dan Manajemen, Ghalia Indonesia : Jakarta
- Hendriwan. 2003. "*Penanggulangan Kemiskinan Dalam Kerangka Kebijakan Desentralisasi*". Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Islami, M. Irfan. 1991. "*Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Manulang. 1987. "*Dasar – Dasar Manajemen*". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu I.L dan B. Simandjuntak. 1982. "*Sosiologi Pembangunan*". Bandung: Penerbit Tarsito.
- Putro. S.T. 1995. "*Peranan Koperasi Dalam Mengentaskan Kemiskinan*". Makalah Disampaikan pada Seminar Kemiskinan Dalam Rangka dies natalis UNRI ke 32 : Pekanbaru
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2002. "*Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*". Jakarta: Bumi Akasara.
- Soegijoko, Budi Tjahjati S. dan BS Kusbiantoro (ed). 1997. "*Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*". Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko.
- Sugiyono. 2009. "*Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*". Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono. Bambang. 1994 "*Hukum dan Kebijakan Publik*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. "*Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia*". Jakarta : Smeru Newsletter
- Wahab Solichin, Abdul. 2001. "*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*" Jakarta. : Bumi Aksara
- Wibawa Samudra. 1994. "*Evaluasi Kebijakan Publik*". Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____. 1994. "*Kebijakan Publik Proses dan Analisis*". Jakarta : Intermedia.
- Winarno, Budi. 2012. "*Kebijakan Publik, Teori dan Proses*". Yogyakarta: Media Presindo.